

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sistematika untuk mendapat teori relevan sesuai pada permasalahan atau topik penelitian. Pada penelitian, tinjauan pustaka dipakai agar dapat membantu peneliti melakukan analisis dengan merujuk teori-teori yang sudah ada dalam penelitian sebelumnya. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti menempatkan penjelasan dari variabel yang terkait.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

2.1.1.1 Definisi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Kuncoro, 2006).

Ketimpangan pendapatan merupakan hal umum yang sering terjadi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Sjafrizal, 2018). Menurut Todaro & Smith

(2006), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Terdapat faktor-faktor yang mendorong ketimpangan pendapatan semakin lebar, yaitu (Sastra, 2017):

- a. Adanya kegagalan institusi dan kebijakan publik
- b. Kemiskinan dan minimnya investasi dan infrastruktur kebutuhan dasar
- c. Penyediaan lapangan kerja dan struktur ekonomi
- d. Adanya perburuan rente
- e. Terjadinya kegagalan pasar
- f. Globalisasi
- g. Faktor politik dan demokrasi

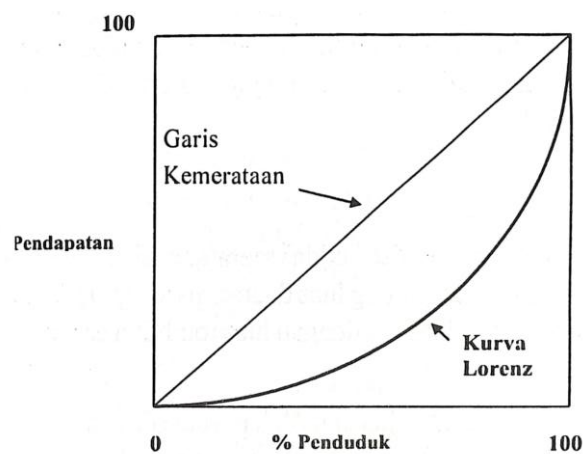
h. Faktor sejarah

2.1.1.2 Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Terdapat beberapa indikator yang biasa digunakan dalam pengukuran ketimpangan pendapatan, antara lain sebagai berikut:

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz, adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Pada tahun 1905, Conrad Lorenz menggambarkan hubungan antara kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan.



Sumber: Arsyad, 2010

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Jumlah penerima pendapatan atau kumulatif penduduk digambarkan pada sumbu horizontal, sementara sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Kedua sumbu tersebut memiliki panjang yang sama yang membentuk bujur sangkar. Kurva Lorenz

menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dengan persentase pendapatan yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal (merata sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang dialami oleh penduduk dalam suatu negara. Apabila kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal, maka semakin rendah derajat ketidakmerataan (Arsyad, 2010).

b. Koefisien gini

Koefisien gini merupakan ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (merata sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar di mana kurva Lorenz tersebut berada (Arsyad, 2010). Dalam pengukuran *World Bank*, nilai indeks gini berada pada rentang 0 (kesetaraan sempurna) hingga 100 (ketimpangan sempurna), dengan pengukuran sebagai berikut (World Bank, 2022):

$$KG = 100 \left(1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)(Y_{i+1} + Y_i) \right)$$

Keterangan:

KG = Angka koefisien gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

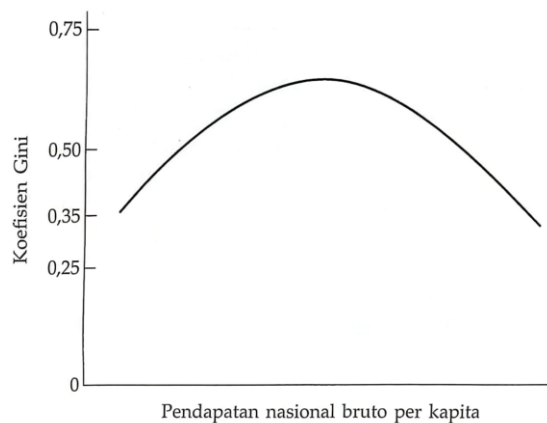
Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 100 berarti ketimpangan sempurna. Ketika rasio gini menurun maka artinya distribusi pengeluaran penduduk membaik dan sebaliknya.

2.1.1.3 Landasan Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Dalam penelitian kuantitatif jumlah teori yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Maka landasan teori dari penelitian ini adalah hipotesis Kuznets, teori perubahan struktural Arthur Lewis, dan teori perdagangan Stolper-Samuleson.

2.1.1.3.1. Hipotesis Kuznets

Hipotesis Kuznets mengatakan bahwa dalam jangka waktu tertentu, kenaikan pendapatan per kapita akan mengurangi ketimpangan. Hal ini dikenal sebagai batas *turning point*. Kurva Kuznets menunjukkan bahwa meskipun korelasi antara GDP per kapita dan ketimpangan distribusi pendapatan tampaknya positif dalam jangka pendek, namun korelasinya akan berubah menjadi negatif dalam jangka panjang (Todaro & Smith, 2006). Arsyad (2010) menjelaskan kurva “U” terbalik yang menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dengan pemerataan distribusi pendapatan, yaitu sebagai berikut.



Sumber: Arsyad, 2010

Gambar 2.2 Kurva "U" Terbalik Kuznets

Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat. Namun pada suatu titik tertentu pertumbuhan yang terjadi akan mengurangi tingkat rasio gini. Observasi inilah yang dikenal sebagai kurva Kuznets "U-terbalik". Karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan yang diukur oleh koefisien gini berbentuk kurva U terbalik seiring dengan naiknya pendapatan per kapita. Pada dasarnya mengacu pada kondisi dasar perubahan struktural. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Perpindahan sektor mendorong terjadinya perpindahan tenaga kerja yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memperlebar kesenjangan pendapatan (Arsyad, 2010).

2.1.1.3.2. Teori Perubahan Struktural Arthur Lewis

Teori perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang awalnya menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan didominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro & Smith, 2006). Transformasi struktural dapat berhasil jika didukung oleh pemerataan kesempatan kerja, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan pengurangan dualisme ekonomi antara kota dan desa. Dalam situasi ini, transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan distribusi pendapatan secara bersamaan (Kuncoro, 2010).

Todaro & Smith (2006), menjelaskan teori model dua sektor dari Arthur Lewis yang menggambarkan bagaimana struktur ekonomi negara berkembang berubah dari pertanian subsisten ke ekonomi modern dan urban dengan sektor industri dan jasa yang lebih variatif. Menurut Lewis, ketimpangan yang memburuk pada tahap awal pembangunan disebabkan terpusatnya sektor industri modern pada pertumbuhan awal yang mempunyai lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitas tinggi. Sektor modern menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional tanpa langsung menaikkan upah secara merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan perbedaan pendapatan yang mencolok di masyarakat, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Proses transformasi dari sektor pertanian yang padat karya dan mampu menyerap banyak tenaga kerja ke sektor industri yang padat modal berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan.

2.1.1.3.3. Teori Perdagangan Stolper-Samuelson

Dalam Salvatore (2017), sebagaimana disajikan dalam artikel asli karya Walt Stolper dan Paul Samuelson, perdagangan akan meningkatkan pendapatan negara dengan sumber daya yang melimpah. Demikian pula, negara-negara dengan pasokan tenaga kerja yang melimpah diharapkan mengalami penurunan ketimpangan domestik. Teori tersebut salah satu pilar model Heckscher-Ohlin yang merupakan model sentral dalam teori neoklasik perdagangan internasional yang menganalisis konsekuensi perdagangan internasional terhadap lapangan kerja dan distribusi pendapatan.

Teori ini pada dasarnya menjelaskan keterkaitan antara kisaran harga relatif barang yang disebabkan oleh intervensi kebijakan perdagangan dan perubahan tingkat pendapatan absolut dari berbagai faktor produksi. Keterkaitan antara harga dan distribusi ini bergantung pada intensitas faktor barang dan komoditas langka, kelangkaan umum, mobilitas faktor industri, mobilitas faktor eksternal, dan pemanfaatan penuh (sebelum dan sesudah intervensi kebijakan perdagangan). Dalam kasus penerapan tarif impor, telah disepakati bahwa peningkatan faktor kelangkaan melebihi perubahan harga kedua barang. Oleh karena itu, efek pendapatan yang dihasilkan lebih kecil daripada peningkatan konsumsi faktor kepemilikan. Dengan kata lain, perubahan harga relatif barang menyebabkan bahkan efek yang lebih besar pada distribusi perdagangan bebas.

Negara-negara mengekspor produk yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor yang langka. Kenaikan harga relatif barang ekspor menyebabkan kenaikan imbal hasil faktor

yang paling intensif digunakan dalam produksi barang tersebut, dan penurunan imbal hasil faktor lainnya. Akibatnya, kebebasan perdagangan menguntungkan pemilik faktor yang melimpah, tetapi merugikan pemilik faktor yang langka.

2.1.1.3.4. Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi dalam Boediono (1984), didasarkan atas teori makronya yang menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti persaingan antara golongan-golongan masyarakat dalam memperebutkan bagian sumber daya yang lebih besar. Proses perebutan ini menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia (timbulnya *inflationary gap*). Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan harga-harga menyebabkan perbedaan kemampuan antar golongan dalam mewujudkan rencana pembelian barang dan jasa. Golongan seperti pemerintah ataupun pengusaha swasta akan berusaha untuk memperoleh tambahan dana sehingga dapat memperoleh *output* yang lebih besar dibandingkan dengan golongan yang memiliki kemampuan terbatas sehingga memperoleh *output* yang kecil termasuk golongan yang penghasilannya tetap dan tidak naik secepat laju inflasi, seperti pegawai tetap, pensiunan, karyawan perusahaan tanpa serikat buruh, dan petani.

Dalam buku *A Tract on Monetary Reform* (1923), Keynes menjelaskan bahwa perubahan nilai uang (inflasi) menyebabkan redistribusi kekayaan yang tidak merata. Dampak inflasi terbagi pada tiga kelompok masyarakat, yaitu inflasi

merugikan bagi investor, menguntungkan bagi bisnis, dan ambigu bagi pekerja. Pekerja yang lebih terorganisir dalam serikat pekerja akan diuntungkan, tetapi pekerja yang kurang terorganisir lain menurunkan upah riil karena keterbatasan dalam menyesuaikan pendapatan. Satu kelompok dapat memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kelompok lain tanpa disadari.

2.1.2 Produk Domestik Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) baik atas dasar harga berlaku maupun dasar harga konstan. Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Bruto* adalah jumlah barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing (Sukirno, 2022). PDB sama dengan total produksi barang konsumsi dan barang investasi, belanja pemerintah, serta *net* ekspor ke negara lain (Samuelson & Nordhaus, 2010). Produk Domestik Bruto (PDB) dibedakan menjadi dua berdasarkan harga patokan yang dipakai, yaitu sebagai berikut (Kurniawan & Budhi, 2018):

a. Produk domestik bruto atas harga berlaku

Produk domestik bruto atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDB atas harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, dan struktur ekonomi suatu wilayah.

b. Produk domestik bruto atas harga konstan

Produk domestik bruto atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh indeks harga.

Berdasarkan penjelasan Basuki & Prawoto (2014), penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga (3) metode pendekatan, antara lain :

a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terdiri dari *wage*/upah (*w*), *rent*/sewa (*r*), *interest*/bunga (*i*), dan *profit*/laba (*p*) Untuk mengukur pendapatan nasional dapat dilihat dari formula berikut:

$$Y = r + w + i + p$$

b. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung berdasarkan total nilai tambah (*value added*) dari setiap sektor kegiatan ekonomi, sehingga menghindari terjadinya perhitungan ganda. Sektor ekonomi tersebut antara lain pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi jasa-jasa; keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Sehingga dengan demikian pendekatan produksi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = NTB1 + NTB2 + NTB3 + \dots NTBn$$

c. Pendekatan Pengeluaran

Metode pengeluaran menggunakan total pengeluaran dari seluruh pelaku ekonomi dalam suatu periode yang meliputi konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan Rumah tangga luar negeri atau *net* ekspor (X-M). Sehingga formula pendekatan pengeluaran dapat sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

2.1.2.1 Produk Domestik Bruto Per Kapita

Pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, jika dilihat dari sisi konsumsi, masyarakat memiliki peluang yang besar untuk menikmati barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak atau dengan kualitas yang lebih baik (Basuki & Prawoto, 2014). Suatu perekonomian dapat dianggap mengalami perkembangan apabila pendapatan per kapita menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dalam jangka panjang dari tahun ke tahun. Kenaikan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun (Rapanna & Sukarno, 2017).

Sukirno (2022) menjelaskan bahwa pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu yang nilainya diperoleh dengan membagi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan harga berlaku untuk memberikan gambaran kemampuan belanja rata-rata penduduk terhadap barang dan jasa dan menggunakan harga konstan untuk menunjukkan perkembangan

tingkat kemakmuran. Perubahan pada PDB dan jumlah penduduk akan berdampak pada pergerakan pendapatan per kapita. Jika peningkatan PDB diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka pendapatan per kapita tetap rendah. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, diperlukan pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk (Basuki & Prawoto, 2014). Sehingga perhitungan pendapatan per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PDB Per Kapita} = \frac{\text{PDB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.1.2.2 Produk Domestik Bruto Menurut Sektoral

Menurut Sukirno (2022), Produk Domestik Bruto digolongkan dalam berbagai sektor di mana nilai tambah diwujudkan yang dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha. Sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia pada awalnya di bagi menjadi 9 sektor yang dibagi menjadi tiga sektor, yaitu sebagai berikut:

- a. Sektor primer, terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan; pertambangan dan penggalian
- b. Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan; listrik, air, dan gas; bangunan
- c. Sektor tersier, mencakup perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, sewa, jasa perusahaan; dan jasa-jasa lain (termasuk pemerintah)

2.1.2.3 Indikator Pengukuran Sektor Ekonomi

Berdasarkan klasifikasi World Bank (2025), sektor jasa mencakup perdagangan grosir dan eceran, perbaikan kendaraan bermotor, hotel dan retail,

transportasi, penyimpanan dan komunikasi, intermediasi keuangan, real estat, penyewaan dan kegiatan bisnis, administrasi publik dan pertahanan, jaminan sosial wajib, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan sosial, kegiatan layanan masyarakat, sosial dan pribadi lainnya, rumah tangga pribadi dengan orang yang bekerja, dan organisasi dan badan ekstra-teritorial. Sementara sektor pertanian mencakup pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri meliputi industri pertambangan, manufaktur, konstruksi, listrik, air, dan gas. Pendekatan ini berkaitan pendekatan produksi, maka pengukuran rasio menurut sektor yaitu sebagai berikut:

$$\text{Sektor Ekonomi} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor}}{\text{Total PDB}} \times 100$$

2.1.2.4 Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan struktur ekonomi atau pada umumnya disebut transformasi struktural didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan) (Tambunan, 2016). Transformasi struktural ditandai dengan adanya perubahan kontribusi sektoral di dalam perekonomian nasional baik dari sisi produk yang dihasilkan maupun penyerapan tenaga kerja (Arsyad, 2010). Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor

tertentu yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi (Tambunan, 2016).

2.1.3 *Economic Freedom*

Miller et al. (2022) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi (*economic freedom*) pada dasarnya merujuk pada otonomi individu dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan barang dan sumber daya ekonomi. Gagasan yang mendukung kebebasan ekonomi berlandaskan asumsi bahwa individu merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan dan keinginan sendiri, sehingga kehidupan yang dijalankan ditentukan secara mandiri berdasarkan prioritas pribadi bukan arahan negara atau kelompok teknokratis. Tingkat kebebasan ekonomi lebih ditentukan oleh sejauh mana kekuasaan pemerintah dibatasi dalam mengintervensi aktivitas ekonomi individu. Peran pemerintah tetap diperlukan untuk menjamin ketertiban dan perlindungan masyarakat, tetapi intervensi yang melebihi kebutuhan dapat mengurangi ruang otonomi ekonomi individu dan membatasi dalam kegiatan ekonomi.

Instrumen pengukuran yang memberikan aspek yang menyeluruh terkait tingkat kebebasan ekonomi suatu negara adalah indeks kebebasan ekonomi atau *index of economic freedom* yang berasal dari lembaga *The Heritage Foundation*. Terdapat 12 indikator kebebasan ekonomi yang digunakan dalam pengukuran diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu:

a. *Rule of law*

Meliputi perlindungan hak milik (*property rights*), efektivitas yudisial (*judicial effectiveness*), dan integritas pemerintah (*government integrity*) yang mengukur keamanan hak milik dan kekuatan sistem hukum.

b. *Government size*

Terdiri atas beban pajak (*tax burden*), belanja pemerintah (*government spending*), dan kesehatan fiskal (*fiscal health*) yang mengukur pengaruh proses politik terhadap alokasi sumber daya.

c. *Regulatory efficiency*

Mencakup kebebasan bisnis (*business freedom*), kebebasan tenaga kerja (*labor freedom*), dan kebebasan moneter (*monetary freedom*) yang mengukur kendala regulasi yang membatasi kebebasan pertukaran dalam kredit.

d. *Market openness*

Market openness meliputi kebebasan perdagangan (*trade freedom*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial (*financial freedom*). Mengukur berbagai hambatan yang telah ditempatkan suatu negara pada perdagangan internasional, seperti tarif.

Pengukuran indeks kebebasan ekonomi suatu negara diperoleh dari rata-rata keseluruhan nilai 12 indikator dengan skala 0 sampai 100. Terdapat lima jenis kategori indeks kebebasan ekonomi, yaitu *free*/bebas (80–100), *mostly free*/sebagian besar bebas (70–79.9), *moderately free*/sedang (60–69.9), *mostly unfree*/sebagian besar tidak bebas (50–59.9), dan *repressed*/tertekan (0–49.9).

2.1.3.1 *Trade Freedom*

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara (Basuki & Prawoto, 2014). (Miller et al., 2022) Miller et al., (2022) menjelaskan bahwa *trade freedom* atau kebebasan perdagangan merupakan ukuran gabungan yang menunjukkan tidak adanya hambatan tarif maupun non-tarif yang mempengaruhi impor dan ekspor barang serta jasa. Indeks kebebasan perdagangan dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. *The trade-weighted average tariff rate*/tarif rata-rata tertimbang dalam perdagangan
- b. *Non-tariff barriers* (NTB)/hambatan non-tarif

Dalam perdagangan internasional, hambatan perdagangan dikenal dengan kebijakan perdagangan (*trade or commercial policy*) yang terbagi ke dalam hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salvatore (2017) menjelaskan bahwa hambatan perdagangan tarif mencakup pengenaan pajak atas barang yang diimpor ataupun diekspor, sedangkan hambatan non-tarif meliputi pembatasan ekspor sukarela, peraturan administrasi, teknis, dan lainnya, kartel internasional, dumping, dan subsidi ekspor. Berikut uraian jenis-jenis hambatan dalam perdagangan internasional sebagaimana dijelaskan dalam literatur tersebut.

a. Tarif Impor

Tarif adalah pajak atau bea masuk yang dibebankan terhadap komoditas perdagangan yang memasuki suatu batas negara, baik dalam kegiatan impor. Secara umum, tarif diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu *ad valorem*, khusus, dan gabungan. Tarif *ad valorem* dinyatakan sebagai persentase tetap harga komoditas perdagangan. Tarif khusus dinyatakan sebagai jumlah tetap tiap satuan barang dari komoditas perdagangan, dan tarif gabungan merupakan kombinasi dari tarif *ad valorem* dan tarif khusus.

b. Kuota Impor

Kuota impor merupakan salah satu hambatan perdagangan non-tarif berupa jumlah maksimum barang dan jasa yang dapat diimpor. Penerapan kuota impor mengubah struktur pasar dalam negeri karena membatasi pasokan dari luar negeri, sehingga harga domestik meningkat dan alokasi sumber daya tidak efisien.

c. Pembatasan Ekspor Sukarela

Pembatasan ekspor secara sukarela mengacu pada kasus di mana negara pengimpor membebani negara lain untuk mengurangi ekspor komoditas secara sukarela, melalui ancaman yang lebih berat, ketika ekspor tersebut mengancam serentetan ancaman seluruh industri dalam negeri.

d. Peraturan Teknis, Administrasi, dan Lain-lain

Berbagai hambatan non-tarif bersumber dari ketentuan teknis, administratif, maupun regulasi yang diberlakukan suatu negara. Bentuk hambatan tersebut berupa standar keamanan untuk produk manufaktur,

persyaratan kesehatan untuk produk kebersihan dan komoditas pangan, atau persyaratan label yang harus dipenuhi oleh barang impor. Ketentuan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi konsumen, tetapi secara tidak langsung menghambat perdagangan.

e. Kartel Internasional

Kartel internasional merupakan organisasi pemasok komoditas yang berlokasi di berbagai negara untuk mengendalikan produksi dan ekspor. Tujuan utama kartel adalah memaksimalkan atau meningkatkan total keuntungan organisasi.

f. Dumping

Dumping merupakan bentuk hambatan yang timbul ketika suatu negara melakukan ekspor komoditas pada harga yang lebih rendah dibandingkan harga di dalam negeri. Terdapat tiga bentuk dumping, yaitu pertama, dumping terus-menerus (*persistent dumping*) atau diskriminasi harga internasional yang terjadi ketika monopoli yang terus menerus untuk memaksimalkan keuntungan dengan menjual komoditas pada harga tinggi di dalam negeri dibandingkan secara internasional. Kedua, dumping ganas (*predatory dumping*) merupakan penjualan komoditas yang bersifat sementara dengan harga yang lebih rendah di pasar luar negeri untuk mendorong melakukan monopoli. Ketiga, dumping sporadis (*sporadic dumping*) dilakukan secara berkala untuk melimpahkan surplus komoditas tanpa menurunkan harga di dalam negeri.

g. Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor merupakan pembayaran langsung, keringanan pajak, atau pinjaman bersubsidi kepada eksportir agar menjual harga yang lebih rendah untuk menggerakkan ekspor negara.

2.1.3.1.1 Indikator Pengukuran *Trade Freedom*

Impor barang dan jasa yang masuk ke suatu negara biasanya dikenakan tarif yang berbeda. Tarif rata-rata tertimbang menghitung nilai rata-rata tarif dengan memberikan bobot pada masing-masing tarif sesuai dengan proporsi impor tersebut. Maka *The Heritage Foundation* mengukur kebebasan perdagangan menggunakan persamaan berikut:

$$Trade\ Freedom_i = 100 \frac{Tariff_{max} - Tariff_i}{Tariff_{max} - Tariff_{min}} - NTB_i$$

$Trade\ Freedom_i$ menunjukkan kebebasan perdagangan di negara i. $Tariff_{max}$ dan $Tariff_{min}$ merepresentasikan batas atas dan batas bawah tarif (%), sedangkan $Tariff_i$ adalah rata-rata tertimbang (%) di negara i. Secara alamiah, tarif minimum bernilai nol persen, sementara batas atas ditetapkan sebesar 50 persen.

Penalti digunakan untuk menyesuaikan skor kebebasan perdagangan seberapa besar suatu negara menggunakan hambatan non-tarif, yaitu sebesar 5, 10, 15, atau 20 poin diberikan. Jika suatu negara menggunakan hambatan non-tarif secara luas pada berbagai jenis barang dan jasa serta secara efektif menghambat bagian arus perdagangan internasional, maka penalti yang dikenakan adalah 20 poin. Penalti 15 poin berlaku apabila hambatan non-tarif tersebar pada berbagai jenis barang dan jasa dan menghambat sebagian besar potensi perdagangan

internasional. Penalti 10 poin dikenakan ketika hambatan non-tarif diterapkan secara selektif, umumnya untuk melindungi komoditas tertentu dan hanya menghambat sebagian aktivitas perdagangan. Sementara itu, pengurangan 5 poin menunjukkan jarang terjadi hambatan non-tarif (NTB) dan melindungi sedikit komoditas, serta memiliki dampak yang sangat terbatas terhadap perdagangan internasional. Penalti 0 poin berarti negara tidak menggunakan hambatan non-tarif untuk membatasi perdagangan internasional, sehingga tidak ada pengurangan nilai yang diberikan. Kategori hambatan non-tarif yang diperhitungkan dalam penalti meliputi:

- a. Pembatasan kuantitas, seperti kuota impor, pembatasan ekspor, *voluntary restraints*, embargo dan larangan ekspor impor, *countertrade*
- b. Pembatasan harga, antara lain bea *antidumping*, bea imbalan, penyesuaian pajak, perbatasan, *variable levies/tariff rate quotas*
- c. Pembatasan regulasi, seperti perizinan, persyaratan kandungan lokal dan *mixing requirements*, standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS), regulasi keselamatan dan standar industri, serta ketentuan terkait pengemasan, pelabelan, dan merek dagang, termasuk aturan periklanan dan media
- d. Pembatasan kepabeanan yang mencakup kewajiban deposit awal, prosedur penilaian kepabeanan, klasifikasi barang, serta prosedur pemeriksaan dan penyelesaian kepabeanan
- e. Intervensi langsung pemerintah, seperti pemerian subsidi dan berbagai bentuk bantuan, kebijakan industrial, pendanaan riset dan kebijakan teknologi,

kebijakan persaingan, pengadaan pemerintah, serta praktik perdagangan negara, monopoli pemerintah, waralaba eksklusif

2.1.4 Inflasi

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi dan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkat di mana uang dipertukarkan untuk mendapatkan barang atau jasa (Mankiw & Taylor, 2019). Sementara definisi lain menegaskan bahwa inflasi terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) antara permintaan dan penawaran agregat, yaitu lebih besarnya permintaan agregat daripada penawaran agregat. Dalam hal ini tingkat harga umum mencerminkan keterkaitan antara arus barang atau jasa dan arus uang. Bila arus barang lebih besar dari arus uang maka akan timbul deflasi, sebaliknya bila arus uang lebih besar dari arus barang maka tingkat harga akan naik dan terjadi inflasi (Zahari et al., 2021). Perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika tiga karakteristik berikut dipenuhi yaitu terjadi kenaikan harga, kenaikan harga bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus (Zahari et al., 2021).

Terdapat beberapa macam untuk menggolongkan macam inflasi, yaitu sebagai berikut (Purnamawati & Yuniarta, 2021) :

- a. Menurut penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi dua yaitu, *demand inflation* yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat dan *cost inflation* yaitu timbul karena kenaikan biaya produksi
- b. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkatannya, yaitu terdiri dari inflasi ringan di bawah 10% per tahun, inflasi menengah antara 10%-30% per tahun, inflasi berat antara 30% 100% per tahun, dan hiperinflasi atau inflasi sangat tinggi yaitu di atas 100% per tahun

2.1.4.1 Indikator Pengukuran Inflasi

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak. Berikut adalah indikator pengukuran inflasi (Mankiw dan Taylor, 2019) :

- a. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen atau *Consumer Prices Index* (CPI) merupakan ukuran tingkat harga secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Tujuan utama IHK adalah mengukur perubahan biaya hidup, yaitu seberapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat untuk membeli barang. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat harga secara umum dalam perekonomian dan persentase perubahan pada IHK mengukur tingkat inflasi. IHK bukan merupakan ukuran biaya hidup yang sempurna karena tiga alasan. Pertama, IHK tidak sepenuhnya memperhitungkan kemampuan konsumen untuk melakukan substitusi terhadap barang yang relatif lebih murah dari waktu ke waktu. Kedua, IHK tidak memperhitungkan peningkatan daya beli uang akibat munculnya barang-barang baru. Ketiga, IHK terdistorsi oleh perubahan kualitas barang dan jasa yang

tidak terukur. Oleh karena itu, IHK cenderung melebih-lebihkan inflasi yang sebenarnya. Berikut adalah pengukuran inflasi dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

$$CPI = \frac{\text{Cost of basket of goods in year } t \text{ prices}}{\text{Cost of basket of goods in base year prices}}$$

$$Inflation_{year\ t} = \frac{(\text{Price Index}_{year\ t}) - (\text{Price Index}_{year\ t-1})}{(\text{Price Index}_{year\ t-1})} \times 100$$

b. GDP Deflator

GDP Deflator merupakan salah satu ukuran yang digunakan ekonom untuk memantau tingkat harga rata-rata dalam perekonomian dengan diukur dari perbandingan GDP dan GDP riil yang digunakan untuk mengukur tingkat harga dalam perekonomian. GDP nominal menggunakan harga berlaku saat ini untuk menilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian, sedangkan GDP riil menggunakan harga tahun dasar yang konstan untuk menilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Berikut adalah pengukuran GDP deflator.

$$GDP\ Deflator = \frac{Nominal\ GDP}{Real\ GDP} \times 100$$

$$Inflation_{year\ t} =$$

$$\frac{(\text{GDP Deflator}_{year\ t}) - (\text{GDP Deflator}_{year\ t-1})}{(\text{GDP Deflator}_{year\ t-1})} \times 100$$

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi salah satu faktor utama dalam melihat *research gap* sebagai salah satu upaya penyempurnaan dari artikel sebelumnya dengan fokus membahas pengaruh PDB per kapita, sektor tersier atau jasa, *trade*

freedom, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian terdahulu dapat diinterpretasikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hayrullahoglu, B., & Tuzun, O. (2020). <i>The effect of taxes on income distribution: An analysis for Turkey and other selected OECD countries.</i>	-Pendapatan per kapita -Inflasi	-Pajak -Pengangguran	Dalam jangka pendek, PDB per kapita berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam jangka panjang, PDB per kapita pengaruhnya negatif signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan.	<i>Economics Business and Organization Research</i> , 413-426.
2.	Khan, Z., & Khan, M. A. (2023). <i>The effect of monetary policy on income inequality: Empirical evidence from Asian and African developing economies.</i>	-Pendapatan per kapita -Inflasi	-Keterbukaan perdagangan -FDI -Penduduk kota	Dalam jangka pendek, PDB per kapita berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam jangka panjang, PDB per kapita berpengaruh negatif signifikan	<i>Journal of Central Banking Theory and Practice</i> , 1 2(3), 133-158.

No.	Penulis/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan.	
3.	Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat pdrb per kapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode tahun 2019-2021.	-Pendapatan per kapita	-IPM -PMA	PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>Economics Business and Organizati on Research</i> , 413-426.
4.	Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). Pengaruh PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.	-Pendapatan per kapita	-IPM -TPAK	PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Nomicpedi a: Journal of Economics and Business Innovation</i> , 2(2), 169-182.
5.	Abate, T. W., & Wendimnew Sitotaw, K. (2024). Analysing the nexus between income inequality and economic growth in Ethiopia: using the non linear auto regressive distributed lag model. <i>Cogent Social Sciences</i> , 10(1), 2328748.	-Hipotesis Kuznets		Dalam jangka pendek dan jangka panjang, PDB memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan, sehingga hipotesis Kuznets tidak berlaku di Ethiopia	<i>Jurnal MSA (Matematik a Dan Statistika Serta Aplikasinya)</i> , 9(1).

No.	Penulis/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Raeskyesa, D. G. S. (2020). Sectoral growth and income inequality in ASEAN-5 countries: case of low-middle income economies.	-Sektor jasa	-Sektor pertanian -Sektor industri	Sektor jasa berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Journal of ASEAN Studies</i> , 8(1), 1-13.
7.	Asman. R., Arham, M. A., & Akib, F. H. Y. (2024). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sulawesi.	-Sektor jasa	-IPM -Sektor pertanian -Sektor industri	Struktur ekonomi jasa memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan</i> , 1(3).
8.	Elhini, M. (2021). <i>An empirical examination of the impact of economic structural change on income inequality: Dynamic heterogeneous panel approach.</i>	-Sektor jasa -Inflasi	-Sektor pertanian -Sektor industri -Pengangguran	Dalam jangka panjang dan jangka pendek, sektor jasa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam jangka pendek, inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>European Journal of Sustainable Development</i> .
9.	Asghar, M., Chaudhry, I. S., Kalroo, R. A., & Ali, S. (2022). <i>Sectoral Output and Income Inequality Nexus in G7 Countries: A Panel ARDL Approach.</i>	-Sektor jasa -Inflasi	-Sektor pertanian -Sektor industri	Dalam jangka pendek, sektor jasa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan dalam jangka panjang sektor jasa berpengaruh negatif signifikan terhadap	<i>South Asian Journal of Management</i> , 16(2), 188-201.

No.	Penulis/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				ketimpangan pendapatan. Sementara, Inflasi dalam jangka panjang dan pendek berpengaruh negatif dan tidak signifikan	
10.	Alfidhatun S., & Al Faqih, N. I. H. (2025). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.	-Sektor Jasa -Inflasi	-Sektor pertanian -Sektor industri -Pertumbuhan ekonomi	PDRB sektor jasa memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Journal of Management, Economics, and Entrepreneur</i> , 4(01), 1-25.
11.	Huynh C. M., Le, Q. N., & Huynh, G. L., (2023). <i>A multidimensional free market and income inequality in developing Asia: How does the quality of governance matter?</i>	-Trade freedom	-Business freedom -Monetary freedom -Financial freedom -Governance quality -Inflasi, -Pendidikan, -FDI -Pengangguran	Trade freedom berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>International Social Science Journal</i> , 73 (250), 1079-1097.
12.	Graafland & Lous (2018). <i>Economic freedom, income inequality and life satisfaction in OECD countries</i>	-Trade Freedom	-Fiscal freedom -Protection of property rights -Sound money -Free trade -Freedom from regulation	Trade freedom memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pendapatan.	<i>Journal of Happiness Studies</i> , 19(7), 2071-2093.
13.	Kandogan, Y., & Johnson, S. D. (2024). <i>Political economy and income</i>	-Trade Freedom	-Political Freedom -Rule of Law	Kebebasan perdagangan memiliki hubungan yang negatif pada	<i>Cogent Social Sciences</i> , 1

No.	Penulis/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>inequality: how did trade liberalization and changes in political and economic freedom affect the middle classes across the world?</i>		-Limited government -Regulatory efficiency	ketimpangan pendapatan di negara dengan berpendapatan sedang dibandingkan dengan negara berpendapatan tinggi dan rendah.	0(1), 2341702.
14.	Akbakay, Z. (2020). <i>Long-Run Relationship between Economic Freedom and Income Inequality: Evidence from G-7 Countries.</i>	-Trade freedom	-Sound money, -Regulation indices -government size index -Legal system -Property rights index	Dalam jangka panjang, <i>trade freedom</i> memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap ketimpangan	<i>Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi</i> , 34 (2), 371-392.
15.	Nazirou, S. C. M., Mousa, D. S. M., & Ahmed, A. T. (2022). <i>The impact of Economic Freedom and Democracy on Income Inequality: Empirical Evidence from Sub-Saharan African Countries</i>	-Trade Freedom	-The Government size index The legal structure and security of property right index, -Regulation of credit -Labor and business index	<i>Trade freedom</i> berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan dengan metode 2SLS, GLS, dan GMM. <i>Trade freedom</i> berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan metode OLS.	<i>Archives of Business Research</i> , 10(3).
16.	Miçooğulları, S. A. (2023). <i>Relationship between inflation and income distribution: An analysis for Turkey using ARDL approach.</i>	-Inflasi		Dalam jangka pendek, inflasi berpengaruh positif tidak signifikan. Sementara dalam jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi</i> , 4(2), 78-87.
17.	Abdi, A. H., Mohamed, A. A., Mohamed, A. A., &	-Pendapatan Per Kapita -Inflasi	-FDI -Pengangguran -Globalisasi	Dalam jangka panjang dan jangka pendek, pendapatan	<i>Research in Globalization</i> , 100301.

No.	Penulis/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mohamed, A. A, (2025). <i>Do globalization, foreign direct investment, and inflation drive income inequality? Evidence from Somalia within the Kuznets curve hypothesis</i>		-Kualitas Kelembagaan	per kapita dan inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	
18.	Saraswati, B. D., Maski, G., Kalug, D., & Sakti, R. K. et al., (2020). <i>Does Financial Technology Affect Income Inequality in Indonesia?</i>	-Inflasi	-Investasi -Pendidikan -Fintech	Dalam jangka pendek dan jangka panjang, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	<i>KnE Social Sciences</i> , 4(7), 151-161.
19.	Mudričenko, ., Laskienė, D., Gižienė, V., & Navickas, V. et al., (2023). <i>An empirical analysis of inflation's influence on income inequality in Lithuania.</i>	-Inflasi		Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Economics, Management and Sustainability</i> , 8(2), 20-31.
20.	Astary, R., Safitri, N., Zarpani, Z., & Harahap, E. F., (2024). Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum provinsi dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.	-Inflasi	-Investasi -Pengeluaran Pemerintah -Investasi -Upah Minimum	Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	<i>Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi</i> , 10(1), 106-115..

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan secara teoritis hubungan antar variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, variabel yang diuji sebanyak empat (4) variabel meliputi PDB per kapita, sektor tersier atau sektor jasa, *trade freedom*, dan inflasi.

2.2.1 Hubungan PDB Per Kapita dengan Ketimpangan Pendapatan

Hipotesis Kuznets dalam Todaro dan Smith (2006), menjelaskan bahwa hubungan antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan bersifat non-linier. Pada tahap awal pembangunan, peningkatan pendapatan per kapita cenderung diikuti oleh peningkatan pendapatan. Namun, setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu (*turning point*), ketimpangan pendapatan berpotensi menurun seiring dengan pemerataan kesempatan kerja. Perubahan distribusi pendapatan berlangsung secara bertahap secara bertahap melalui penyesuaian struktur ekonomi, pergeseran tenaga kerja antar sektor, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khan & Khan (2023) dan Hayrullahoglu & Tuzun (2020) sejalan dengan hipotesis Kuznets menunjukkan bahwa dalam jangka pendek PDB per kapita memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan dalam jangka panjang pengaruhnya negatif.

PDB per kapita mencerminkan tingkat pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat. Peningkatan PDB per kapita pada awal pembangunan belum diikuti oleh pemerataan pendapatan karena manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Seiring dengan meningkatnya tingkat pembangunan ekonomi

mendorong perbaikan distribusi pendapatan. Sehingga PDB per kapita diduga berpengaruh dalam jangka pendek dalam jangka panjang terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.2 Hubungan Sektor Jasa dengan Ketimpangan Pendapatan

Teori perubahan struktural menjelaskan proses pembangunan ekonomi ditandai oleh pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern. Model dualisme Lewis dalam Todaro dan Smith (2006), menjelaskan bahwa pada awal pembangunan, peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang berproduktivitas lebih tinggi dapat mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan, terutama apabila manfaat pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pergeseran menuju sektor jasa atau tersier, umumnya memiliki tingkat produktivitas dan upah yang lebih beragam dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Namun, transformasi struktural yang diikuti pemerataan kesempatan kerja dan pengurangan dualisme ekonomi antara kota dan desa dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asghar et al. (2022), menyatakan bahwa jika dalam jangka pendek sektor jasa dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dan dalam jangka panjang sektor jasa dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Didukung oleh penelitian Raeskyesa (2020) yang menunjukkan sektor jasa memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan, sementara penelitian Asman et al. (2024) menunjukkan hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Peran sektor jasa dalam menyediakan sumber daya manusia meningkat yang terlihat dari kontribusi sektor jasa dalam menciptakan produk nasional dan menampung pekerja dalam perekonomian secara keseluruhan. Dampak terhadap ketimpangan pendapatan bergantung pada karakteristik sub-sektor jasa yang berkembang. Sektor jasa berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan apabila pertumbuhan sektor tersebut lebih menyerap tenaga kerja terampil dengan tingkat upah yang tinggi, sementara sebagian kegiatan jasa lainnya masih terkonsentrasi pada sektor informal dengan produktivitas dan tingkat pendapatan yang rendah. Walaupun terjadi upah rendah di sektor jasa, namun masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan upah oleh keberadaan perusahaan multinasional. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pengurangan ketimpangan pendapatan bisa terjadi karena perusahaan multinasional membayar dengan upah yang lebih tinggi pada pekerja dengan keterampilan rendah. Oleh karena itu, struktur ekonomi sektor jasa diduga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.3 Hubungan *Trade Freedom* dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut teori Stolper–Samuelson dalam Salvatore (2017), perdagangan bebas dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui perubahan harga relatif barang. Perdagangan bebas mendorong berkembangnya sektor-sektor tertentu yang memiliki mengubah struktur produksi suatu negara. Sektor-sektor yang lebih unggul berkembang, sehingga perubahan kebutuhan faktor produksi ini meningkatkan pendapatan tenaga kerja dan pemilik modal dan mengurangi ketimpangan. Namun, kebebasan perdagangan dapat berkaitan dengan

meningkatnya ketimpangan pendapatan ketika manfaat perdagangan terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan dapat menurunkan ketimpangan apabila dengan perdagangan bebas mampu memperluas kesempatan ekonomi dan mendorong pemerataan pendapatan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kebebasan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan menurut penelitian Akbakay (2020), bahwa dalam jangka panjang *trade freedom* berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hubungan negatif antara *trade freedom* dengan ketimpangan pendapatan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kandogan & Johnson (2024). Sementara penelitian Graafland & Lous (2018) menemukan *trade freedom* dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, kebebasan perdagangan diduga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui perubahan struktur produksi dan distribusi pendapatan faktor produksi. Arah pengaruh bergantung pada faktor produksi yang memperoleh manfaat lebih besar dari perdagangan bebas, sehingga *trade freedom* berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.4 Hubungan Inflasi dengan Ketimpangan Pendapatan

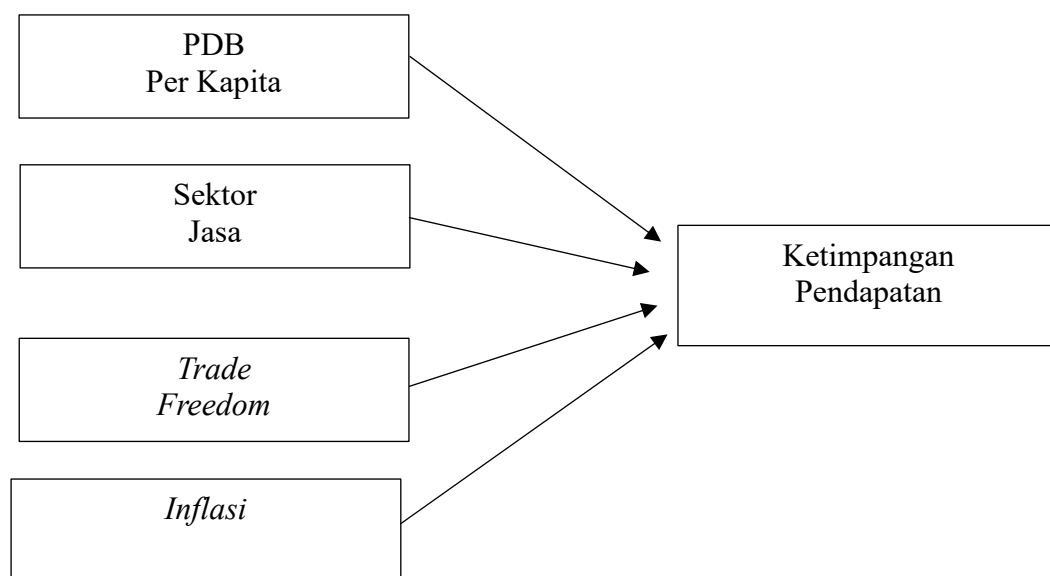
Menurut teori Keynes dalam Boediono (1984), inflasi terjadi akibat permintaan agregat melebihi kapasitas *output* perekonomian, menyoroti persaingan antara golongan-golongan masyarakat dalam memperebutkan bagian sumber daya yang lebih besar yang memiliki dampak terhadap redistribusi kekayaan yang tidak merata. Seperti pemerintah dan pengusaha yang mampu meningkatkan permintaan

efektif sehingga memperoleh *output* yang lebih besar. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber dana seperti pendapatan tetap atau penghasilannya tidak naik secepat inflasi memperoleh *output* yang lebih kecil. Sebab tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdi et al. (2025), menyatakan bahwa Dalam jangka panjang dan jangka pendek, pendapatan per kapita dan inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Didukung oleh penelitian Miçooğulları (2023) bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al. (2020) menemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Perubahan tingkat inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inflasi mendorong redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Inflasi yang tinggi cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan karena daya beli kelompok berpendapatan rendah lebih cepat tergerus dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk kebutuhan pokok, sehingga kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar memberikan dampak yang lebih besar

pada mereka. Oleh karena itu, inflasi diduga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap suatu permasalahan, sebab jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Diduga PDB per kapita, struktur ekonomi, *trade freedom*, dan inflasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek dan jangka panjang
- b. Diduga *Kuznets Curve Hypothesis* (KCH) berlaku di Indonesia pada jangka panjang